

SKRIPSI



IMPLEMENTASI SISTEM E-GOVERNMENT BERBASIS APLIKASI PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DKI JAKARTA

Disusun oleh :

Nama : Elvia Novi Hapsari
NPM : 2020011138
Jurusan : Administrasi Publik
Program Studi : Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur

PROGRAM SARJANA TERAPAN
POLITEKNIK STIA LAN
JAKARTA LEMBAGA
ADMINISTRASI NEGARA
JAKARTA, 2024



**IMPLEMENTASI SISTEM E-GOVERNMENT BERBASIS
APLIKASI PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH DKI JAKARTA**

**Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana
Terapan Oleh**

Nama : Elvia Novi Hapsari
NPM : 2020011138
Jurusan : Administrasi Publik
Program Studi : Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur

**PROGRAM SARJANA TERAPAN
POLITEKNIK STIA LAN
JAKARTA LEMBAGA
ADMINISTRASI NEGARA
JAKARTA, 2024**

LEMBAR PERSETUJUAN

NAMA : Elvia Novi Hapsari
NPM : 2020011138
JURUSAN : Administrasi Publik
PROGRAM STUDI : MSDMA
JUDUL : Implementasi Sistem E-Government Berbasis Aplikasi
Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah DKI
Jakarta

Diterima dan disetujui untuk dipertahankan

Jakarta, 10 Juni 2024

Pembimbing

(Drs. Edy Kusponco Wibowo. M.Si, CHRM)

POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A

LEMBAR PENGESAHAN

Diperiksa dan disahkan oleh Tim Penguji Ujian Tingkat Akhir Sarjana Terapan
Politeknik STIA LAN Jakarta Pada 28 Agustus 2024



Ketua merangkap Anggota

(Bambang Suhartono, S. Sos., ME)

Sekretaris merangkap Anggota

(Dr. Achmad Djatmiko, MA)

Anggota

(Drs. Eddy Kusponco Wibowo. M.Si, CHRM)

POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A

PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH TUGAS AKHIR

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Elvia Novi Hapsari
NPM : 2020011138
Jurusan : Administrasi Publik
Program Studi : MSDMA

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan Tugas Akhir yang telah saya buat dengan judul “IMPLEMENTASI SISTEM E-GOVERNMENT BERBASIS APLIKASI PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DKI JAKARTA” merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila di kemudian hari penulisan Tugas Akhir ini merupakan **hasil plagiat** atau **penjiplakan** terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia **menerima sanksi** berdasarkan peraturan Politeknik STIA LAN Jakarta dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tidak ada paksaan.

Jakarta, 10 Juni 2024

Penulis,

A yellow 10,000 Rupiah stamp is placed over the signature. The stamp features the Indonesian coat of arms and the text 'REPUBLIK INDONESIA', '10.000', 'MESEKAI', and 'FEBREL'. The serial number '1AFDDALX347046931' is visible at the bottom of the stamp.

(Elvia Novi Hapsari)

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang selalu memberikan kesehatan, baik kesehatan jasmani maupun kesehatan rohani, dan memberikan kesempatan untuk dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam tidak lupa juga dihadiahkan untuk junjungan Nabi besar kita nabi Muhammad SAW, atas segala perjuangan dan amanah yang diberikannya yang tak pernah hilang yang selalu kita kenang. Adapun maksud dan tujuan penulisan skripsi ini adalah merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada program Sarjana Terapan di Politeknik STIA LAN Jakarta. Pada kesempatan ini saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah banyak berkontribusi membantu dalam penyelesaian skripsi ini. Adapun bimbingan dari Bapak Drs. Eddy Kusponco Wibowo. M.Si.CHRM. selaku dosen pembimbing skripsi yang senantiasa memberikan ilmu, arahan, dan bimbingan selama penyusunan skripsi ini. maupun arahan-arahan dari pihak bersangkutan, sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini sampai dengan waktu yang telah ditetapkan. Disampaikan ucapan terima kasih kepada:

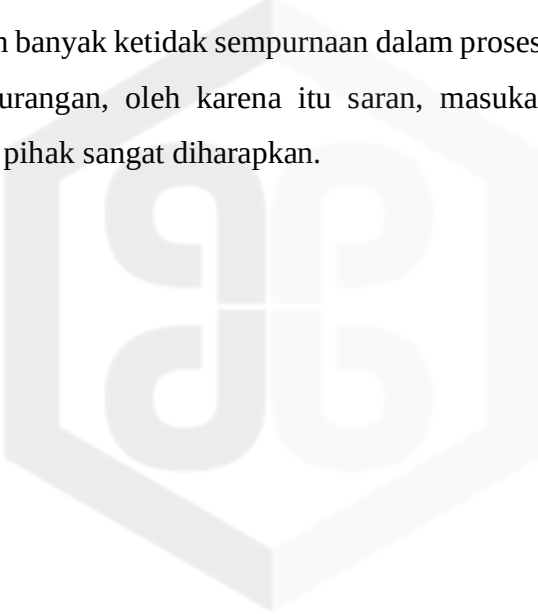
1. Ibu Prof. Dr. Nurliah Nurdin, MA. selaku Direktur Politeknik STIA LAN Jakarta.
2. Bapak Drs. H. Isnawa Adji, M.A.P selaku Kepala Pelaksana BPBD Provinsi DKI Jakarta, yang telah memberikan kesempatan untuk melaksanakan penelitian di Badan Penanggulangan Bencana Daerah DKI Jakarta Pusat Pembinaan.
3. Bapak Michael Sitanggang, selaku Kasatpel Pengolah Data dan Informasi Kebencanaan yang telah memfasilitasi dan menjadi narasumber dalam penelitian ini.
4. Bapak Ahmad Fauzan, selaku Pengendali Teknologi Informasi di Badan Penanggulangan Bencana Daerah DKI Jakarta yang telah bersedia menjadi narasumber dalam penelitian ini.
5. Ibu Priyanka, selaku Community Manager di Pusat Data dan Informasi

Kebencanaan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah DKI Jakarta yang telah bersedia menjadi narasumber dalam penelitian ini.

6. Bapak Ryanarditra, selaku Staff KPBJ yang bertugas sebagai Tim Reaksi Cepat (TRC) di Badan Penanggulangan Bencana Daerah DKI Jakarta yang telah bersedia menjadi narasumber dalam penelitian ini.
7. Kedua orang tua saya, Bapak Mardiyanto Hari Santoso dan Ibu Yenita Roza. Terimakasih untuk doa, kasih sayang, cinta, dukungan, pengorbanan dan motivasi. Menjadi suatu kebanggaan memiliki orang tua yang selalu berkata iya dan mendukung anaknya untuk mencapai cita-cita. Terimakasih telah menjadi orang tua yang tidak pernah menyakiti hati anaknya baik secara perkataan atau perbuatan. Terimakasih selalu berjuang untuk kehidupan saya. Sehat selalu dan hiduplah lebih lama lagi, papa dan mama harus selalu ada di setiap perjalanan & pencapaian hidup saya.
8. Kepada abang saya, Diky Darma Santoso terimakasih atas pengorbanan dan dukungannya baik secara moril dan materi, memotivasi dan mendoakan penulis.
9. Kepada teman-teman seperjuangan dari awal perkuliahan hingga sekarang Farrel Alfiaanda, Sekar Amalia, Fania Permata, Henry Nugraha, Najwa Utami, Madeline Chaney terimakasih atas dukungan, semangat, motivasi dan bantuan terhadap penulis.
10. Kepada seseorang yang tak kalah penting kehadirannya, Rafael Owen. Terimakasih telah menjadi bagian dari perjalanan hidup penulis. Berkontribusi banyak dalam penulisan karya tulis ini, baik tenaga maupun waktu kepada penulis. Telah mendukung, menghibur, mendengarkan keluh kesah, dan memberikan semangat untuk pantang menyerah. Doa baik untukmu semoga apa yang kita semoga kan tersemoga kan.
11. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu memberikan pemikiran demi kelancaran dan keberhasilan penyusunan skripsi ini

12. Dan yang terakhir, kepada diri saya sendiri, Elvia Novi H. Terimakasih sudah bertahan sejauh ini. Terimakasih tetap memilih berusaha dan merayakan dirimu sendiri sampai di titik ini. Walau sering kali merasa putus asa atas apa yang diusahakan dan belum berhasil, namun terima kasih tetap menjadi manusia yang selalu mau berusaha dan tidak lelah mencoba. Terima kasih karena memutuskan tidak menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini dan telah menyelesaikannya sebaik dan semaksimal mungkin, ini merupakan pencapaian yang patut dirayakan untuk diri sendiri. Berbahagialah selalu dimanapun berada el, apapun kurang dan lebihmu mari merayakan diri sendiri.

Penulis menyadari masih banyak ketidak sempurnaan dalam proses penyusunan skripsi ini masih terdapat kekurangan, oleh karena itu saran, masukan serta kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan.



POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A

ABSTRAK

“Implementasi Sistem E-Government Berbasis Aplikasi Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah DKI Jakarta”

Nama : Elvia Novi Hapsari

NPM : 20200011138

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses efektivitas implementasi sistem E-government pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah DKI Jakarta. Implementasi sistem *E-Government* berbasis aplikasi ini diukur menggunakan kebijakan yang dikeluarkan oleh Presiden dalam bentuk Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik dengan menjelaskan ke 3 (tiga) aspek, yaitu : kesiapan akses sistem *E-Government*, sumber daya manusia, infrastruktur dan aplikasi dasar. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif penelitian ini menguraikan/mendeskripsikan bagaimana proses implementasi sistem *E-Government* pada badan penanggulangan bencana daerah DKI Jakarta (BPBD DKI Jakarta). Hasil penelitian ini menggambarkan bahwa BPBD DKI Jakarta sangat serius dalam setiap kebijakan maupun pelaksanaan program terkait dengan upaya peningkatan kualitas pelayanan publik, walaupun terdapat beberapa dinamika yang terjadi seperti terjadinya penyesuaian terhadap penggunaan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Bencana (SIMBA) lalu adanya tantangan dalam menyamakan kompetensi antar pegawai. Rekomendasi yang disarankan adalah BPBD DKI Jakarta diharapkan dapat meningkatkan infrastruktur teknologi terkait dengan jaringan internet, perangkat keras dan perangkat lunak.

Kata Kunci : *E-Government*, Implementasi , Sistem Informasi Manajemen Bencana.

POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A

ABSTRACT

Implementation of Application-Based E-Government System at DKI Jakarta Regional Disaster Management Agency

Name : Elvia Novi Hapsari

NPM : 20200011138

This research aims to find out the effectiveness of the e-government system implementation process at the DKI Jakarta Regional Disaster Management Agency. The implementation of this application-based E-Government system is measured using policies issued by the President in the form of Presidential Regulation of the Republic of Indonesia Number 95 of 2018 concerning electronic-based government systems by explaining 3 (three) aspects, namely: e-government system access readiness, human resources, Basic infrastructure and application. This research uses a qualitative approach with a descriptive research type. This research describes the process of implementing the E-Government system at the DKI Jakarta regional disaster management agency (BPBD DKI Jakarta). The results of this research illustrate that BPBD DKI Jakarta is very serious in every policy and program implementation related to efforts to improve the quality of public services, even though there are several dynamics that occur, such as adjustments to the use of the SIMBA application and challenges in equalizing competencies between employees. The recommended recommendation is that BPBD DKI Jakarta is expected to improve technological infrastructure related to internet networks, hardware and software.

Keywords: *E-Government, Implementantion , Sistem Informasi Manajemen Bencana.*

**POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A**

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH TUGAS AKHIR.....	iv
ABSTRAK.....	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Permasalahan.....	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Tinjauan Kebijakan.....	10
B. Tinjauan Teori	11
C. Konsep Kunci	23
D. Kerangka Berpikir	24
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	26
A. Metode Penelitian.....	26
B. Teknik Pengumpulan Data.....	27
C. Uji Keabsahan Data.....	30
D. Instrumen Penelitian.....	31
BAB IV HASIL PENELITIAN	37
A. Penyajian Data	37
B. Pembahasan.....	47
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	87

A. Kesimpulan	87
B. Saran.....	90
Lampiran	95



POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A

DAFTAR TABEL

Table 1 Alasan Pemilihan Informan.....	29
Table 2 Instrumen Penelitian.....	31



POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Kerangka Berpikir.....	24
Gambar 2 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta.....	37
Gambar 3 Struktur Organisasi BPBD DKI Jakarta	38
Gambar 4 Portal Login SIMBA BPBD	50
Gambar 5 Ruang Call Center.....	51
Gambar 6 Ruang Command Center.....	51
Gambar 7 Dashboard SIMBA	52
Gambar 8 Status Petugas TRC	57
Gambar 9 Layar Monitoring 24 Jam	60
Gambar 10 Contoh Pengelolaan Data Terhadap Pelaporan Bencana Real Time.....	61
Gambar 11 Contoh Pelaporan Harian dari Masyarakat.....	65
Gambar 12 Contoh Akses Fitur SIMBA	66
Gambar 13 Hasil Pengeolaan Data SIMBA.....	68
Gambar 14 Infografis Pelaporan Bencana.....	74



**POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia, sebuah negara kepulauan yang terletak di kawasan Pasifik, memiliki wilayah yang rawan terhadap berbagai bencana alam. Tidak terkecuali Jakarta, ibu kota negara dan kota metropolitan terbesar di Indonesia, yang sering kali menjadi sorotan akibat masalah banjir, tanah longsor, dan kebakaran yang sering terjadi di wilayah tersebut. Sebagai respons terhadap kompleksitas dan eskalasi ancaman bencana yang dihadapi, pemerintah Indonesia telah mengambil berbagai langkah untuk meningkatkan kapasitas dalam merespons bencana, termasuk dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) melalui implementasi sistem *e-government*.

E-Government dapat didefinisikan sebagai model yang menyediakan layanan publik kepada masyarakat melalui internet. Definisi ini sejalan dengan yang dikemukakan oleh Bank Dunia (2011), yang sering digunakan dalam berbagai penelitian. *E-Government* melibatkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (ICT), seperti jaringan area luas, internet, dan komunikasi mobile oleh instansi pemerintah untuk menjalin hubungan G2C (pemerintah kepada warga), G2B (pemerintah kepada sektor bisnis), dan G2G (pemerintah kepada pemerintah). Berbeda dengan komunikasi tradisional yang bersifat linier dan hierarkis, *e-government* mendorong interaksi dua arah yang berkesinambungan antara pemerintah dan masyarakat.

E-Government juga dapat diartikan sebagai hubungan antara pemerintah dengan warga negara, sektor bisnis, dan sektor publik, yang mengalihkan pendekatan "perintah dan kontrol" menuju kolaborasi yang lebih interaktif. Menurut Esteves & Joseph (2008), *e-government* mendesentralisasikan kegiatan yang sebelumnya terpusat untuk mencapai efisiensi, produktivitas, dan penyampaian layanan yang optimal. Berdasarkan

pernyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa *e-government* memiliki dua tujuan utama. Pertama, penggunaan ICT oleh pemerintah diharapkan dapat mendukung efisiensi dan efektivitas dalam kebijakan pelayanan publik.

E-Government diharapkan dapat memberdayakan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terkait kebijakan publik. Keberhasilan *e-government* dalam mencapai tujuan ini dipengaruhi oleh teknologi sebesar 20% dan faktor manusia, proses, serta organisasi sebesar 80% (United Nations, 2012). Tantangan utama *e-government* bukan hanya pada aspek teknologinya, tetapi juga pada kesediaan warga untuk mengadopsinya.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) telah membawa transformasi signifikan dalam cara organisasi bisnis memasarkan produk dan layanannya serta membentuk interaksi dengan pelanggan. Tidak ingin tertinggal dari sektor swasta, pemerintah mulai memanfaatkan TIK untuk memperkuat interaksi dengan warga negara, komunitas bisnis global, dan sesama instansi pemerintah. *E-Government* menjadi titik balik dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Penelitian oleh Karin Afriani dan Fathul Wahid (2009) menunjukkan bahwa implementasi *e-government* oleh institusi pemerintah telah meningkatkan persepsi masyarakat terhadap prinsip-prinsip tata kelola yang baik, yaitu kepedulian terhadap pemangku kepentingan, efektivitas dan efisiensi, partisipasi masyarakat, akuntabilitas, dan transparansi. Heeks (2002) menyatakan bahwa peran TIK dalam proses reorganisasi institusi pemerintah sejalan dengan empat pilar rencana *New Public Management* (NPM), yaitu peningkatan efisiensi, desentralisasi, peningkatan akuntabilitas, perbaikan manajemen sumber daya, dan penciptaan prosedur pasar.

Pemerintah Indonesia telah lama menyadari pentingnya *e-government*. Hal ini ditandai dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 2001 tentang “Pengembangan dan Pendayagunaan Telematika di

Indonesia”, yang menginstruksikan institusi publik untuk memanfaatkan teknologi telematika guna mendukung tata kelola pemerintahan yang baik dan mempercepat proses demokrasi. Kebijakan terkait pengembangan e-government kemudian diperkuat melalui Inpres No. 3 Tahun 2003 tentang “Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-Government*”.

Inpres tersebut bertujuan untuk membangun jaringan pelayanan publik berkualitas yang dapat diakses oleh semua warga negara kapan saja, membangun interaksi interaktif dengan komunitas bisnis global untuk memperkuat perekonomian nasional, membangun prosedur dan saluran komunikasi antar lembaga negara, menyediakan sarana bagi warga untuk berpartisipasi dalam pengesahan kebijakan publik, serta menciptakan manajemen pemerintahan yang transparan dan efisien.

Meskipun inisiatif pengadaan layanan *e-government* telah dilakukan oleh berbagai instansi pemerintah, banyak rencana yang memakan biaya besar namun berakhir dengan kegagalan. Hal ini menjadi alasan mengapa perkembangan *e-government* di Indonesia masih tertinggal dibandingkan negara lain. Menurut studi PBB 2012, indeks pembangunan *e-government* Indonesia berada di peringkat 97 dunia, dan di Asia Tenggara, Indonesia berada di urutan ketujuh setelah Singapura, Malaysia, Brunei Darussalam, Vietnam, Filipina, dan Thailand.

Saat ini, dunia berada di puncak Revolusi Industri 4.0 dengan kemajuan pesat dalam digitalisasi yang merambah berbagai bidang, termasuk pemerintahan. Digitalisasi sistem pemerintahan merupakan salah satu bentuk reformasi birokrasi yang harus diikuti oleh pemerintah Indonesia. Menurut Erwin Ariadharma, *Senior Public Sector Management Specialist* Bank Dunia yang menjadi keynote speaker pada acara *Transformation Corner*, tren global saat ini mengharuskan setiap komunitas memiliki akses terhadap setiap aktivitas atau kebijakan pemerintah.

Implementasi sistem *e-government* pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jakarta adalah bagian dari upaya pemerintah dalam meningkatkan efisiensi, responsivitas, dan efektivitas dalam penanggulangan bencana di wilayah tersebut. Sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas penanganan bencana di ibu kota, BPBD Jakarta memiliki peran krusial dalam memastikan keselamatan dan kesejahteraan penduduk Jakarta dalam menghadapi ancaman bencana yang semakin kompleks dan sering terjadi.

Dalam konteks Indonesia, implementasi sistem *e-government* bukanlah hal yang baru. Sejak awal tahun 2000-an, pemerintah Indonesia telah mengambil langkah-langkah untuk mengadopsi sistem *e-government* dalam berbagai aspek pelayanan publik, termasuk dalam penanggulangan bencana. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam manajemen bencana diharapkan dapat meningkatkan koordinasi antarinstansi, mempercepat alur informasi, dan memperluas partisipasi masyarakat dalam upaya mitigasi dan respons terhadap bencana.

Tantangan bencana yang dihadapi oleh Jakarta sangatlah kompleks. Banjir merupakan salah satu masalah yang paling sering terjadi di ibu kota, terutama selama musim hujan. Faktor-faktor seperti pertumbuhan pesat penduduk, pembangunan yang tidak terkendali, serta perubahan iklim global telah meningkatkan kerentanan Jakarta terhadap banjir dan bencana alam lainnya. Selain itu, pertumbuhan infrastruktur yang tidak teratur juga meningkatkan risiko terjadinya tanah longsor dan kebakaran di berbagai wilayah Jakarta.

Kondisi geografis Jakarta yang rendah dan terletak di dataran rendah membuat kota ini rentan terhadap genangan air saat hujan lebat. Pembangunan tanpa perencanaan yang matang juga mempersempit saluran air dan mengurangi kemampuan alamiah kota ini untuk menyerap air hujan. Akibatnya, banjir telah menjadi masalah yang kronis di Jakarta, yang tidak hanya merugikan dari segi ekonomi dan sosial, tetapi juga mengancam keselamatan

dan kesejahteraan warga Jakarta.

Dalam menghadapi tantangan ini, BPBD Jakarta memiliki peran yang sangat penting dalam mengkoordinasikan upaya penanggulangan bencana di wilayah tersebut. Dalam beberapa tahun terakhir, BPBD Jakarta telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kapasitas dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana, termasuk dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Implementasi sistem e-government pada BPBD Jakarta bertujuan untuk mengatasi sejumlah tantangan yang dihadapi oleh lembaga tersebut dalam penanggulangan bencana. Salah satu tantangan utama adalah koordinasi antarinstansi yang kompleks dalam situasi darurat. Dalam situasi bencana yang cepat berkembang, koordinasi yang efektif antara berbagai pihak terkait seperti pemerintah daerah, kepolisian, dan lembaga penyelamat sangatlah penting untuk memastikan respons yang cepat dan tepat.

Melalui sistem e-government, BPBD Jakarta dapat meningkatkan efektivitas koordinasi antarinstansi dengan memfasilitasi pertukaran informasi yang cepat dan akurat. Platform digital yang terintegrasi memungkinkan berbagai pihak terkait untuk memantau perkembangan situasi bencana secara real-time dan mengambil tindakan yang diperlukan dengan cepat. Selain itu, sistem e-government juga memungkinkan BPBD Jakarta untuk meningkatkan responsivitas dalam merespons bencana. Melalui aplikasi dan platform digital, masyarakat dapat dengan mudah melaporkan kejadian darurat, meminta bantuan, dan menerima informasi terkait tindakan yang harus diambil dalam situasi darurat. Hal ini tidak hanya mempercepat proses respons, tetapi juga memungkinkan BPBD Jakarta untuk mendapatkan informasi yang lebih akurat dan lengkap tentang situasi bencana.

Meskipun upaya digitalisasi telah dilakukan, implementasi sistem e-Government di BPBD DKI Jakarta menghadapi beberapa permasalahan dan kesenjangan yang menghambat optimalisasinya. Tantangan utama adalah keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang kompeten dalam teknologi

informasi, karena tidak semua pegawai memiliki keterampilan yang memadai untuk mengoperasikan dan memelihara sistem tersebut. Pelatihan dan peningkatan kapasitas SDM perlu ditingkatkan agar sistem dapat berjalan dengan baik. Selain itu, kesenjangan literasi digital masyarakat yang signifikan menyebabkan rendahnya partisipasi dan penggunaan layanan e-Government, sehingga mengurangi efektivitas sistem.

Implementasi sistem e-government pada BPBD Jakarta juga memiliki dampak positif dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penanggulangan bencana. Dengan menyediakan informasi yang lebih terbuka dan mudah diakses kepada masyarakat, BPBD Jakarta dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga tersebut dan memperkuat legitimasi institusi publik. Selain itu, implementasi sistem e-government juga memungkinkan BPBD Jakarta untuk melakukan analisis data yang lebih mendalam terkait bencana. Dengan memanfaatkan teknik analisis data dan kecerdasan buatan, BPBD Jakarta dapat mengidentifikasi pola-pola bencana, mengukur dampaknya, dan mengembangkan strategi mitigasi yang lebih efektif. Hal ini dapat membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih baik dan responsif dalam situasi darurat.

Dalam konteks ini, implementasi sistem e-government pada BPBD Jakarta dapat dipandang sebagai langkah strategis dalam meningkatkan kapasitas dan responsabilitas lembaga dalam mengelola bencana. Dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, BPBD Jakarta dapat memperkuat koordinasi antarinstansi, meningkatkan responsivitas dalam merespons bencana, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, serta melakukan analisis data yang lebih mendalam untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan resiliensi dalam menghadapi bencana. Dengan demikian, implementasi sistem e-government pada BPBD Jakarta bukan hanya sekadar investasi dalam teknologi, tetapi juga merupakan langkah strategis untuk memperkuat kesiapsiagaan dan resiliensi kota Jakarta dalam menghadapi

tantangan bencana di masa depan.

Salah satu inisiatif implementasi sistem *e-government* pada tingkat daerah adalah pengembangan aplikasi atau platform digital yang dirancang khusus untuk memfasilitasi pengelolaan dan penanggulangan bencana. Di Jakarta, aplikasi tersebut dikenal dengan nama SIMBA (Sistem Informasi Manajemen Bencana). SIMBA adalah sebuah sistem informasi yang dikembangkan oleh BPBD Jakarta untuk memantau, mengelola, dan merespons bencana secara efektif. Dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi informasi dan komunikasi, SIMBA diharapkan dapat membantu BPBD Jakarta dalam melakukan tugas-tugasnya dengan lebih efisien dan responsif.

Implementasi SIMBA oleh BPBD Jakarta merupakan bagian dari upaya lebih luas pemerintah Jakarta dalam meningkatkan kesiapsiagaan dan resiliensi kota terhadap bencana. Langkah ini sejalan dengan visi dan misi pemerintah Jakarta untuk menciptakan kota yang aman, nyaman, dan berkelanjutan bagi seluruh penduduknya. Dalam implementasi SIMBA, BPBD Jakarta bekerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat, dan sektor swasta, untuk memastikan kesuksesan dan keberlanjutan inisiatif ini.

Dalam penelitian ini, akan dibahas lebih lanjut mengenai konteks bencana di Jakarta, peran BPBD Jakarta dalam penanggulangan bencana, tantangan yang dihadapi, motivasi pengembangan SIMBA, serta dampak implementasi sistem *e-government* pada penanggulangan bencana di tingkat daerah. Dengan memahami latar belakang ini, pembaca akan dapat memahami pentingnya implementasi sistem *e-government* pada BPBD Jakarta dan kontribusinya dalam meningkatkan kesiapsiagaan dan resiliensi kota Jakarta terhadap bencana.

Perkembangan teknologi ini didorong oleh arahan Presiden Jokowi pada Agustus 2020 yang menekankan lima aspek utama untuk mempercepat

transformasi digital. Aspek-aspek tersebut meliputi perluasan akses, roadmap digitalisasi sektor-sektor strategis, integrasi data, kesiapan sumber daya manusia (SDM), dan program pendanaan. Kementerian Komunikasi dan Informatika kemudian mengadaptasi arahan ini ke dalam enam arah Roadmap Digital Indonesia 2021-2024. Namun, hingga kini, implementasi kebijakan transformasi digital, termasuk amanat presiden dan roadmap dari Kominfo, masih sebatas pada 'transformasi instrumental'.

Penyediaan layanan digital publik dan perkembangan berbagai aplikasi seharusnya tidak hanya berfokus pada aspek kuantitatif untuk “merayakan” era teknologi baru. Proses digitalisasi harus dilakukan dengan semangat untuk membantu masyarakat mendapatkan akses yang adil, inklusif, seimbang, dan setara terhadap layanan tersebut. Dari uraian diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai judul “ **Implementasi Sistem E-Government Berbasis Aplikasi Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah DKI Jakarta** ”.

B. Rumusan Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut : Bagaimana implementasi sistem e-government berbasis aplikasi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah DKI Jakarta?

C. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui pengimplementasian sistem e-goverment berbasis aplikasi di Badan Penanggulangan Bencana Daerah DKI Jakarta.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis

Melalui Penelitian ini bertujuan untuk memberikan tambahan wacana penelitian empiris dan pertimbangan untuk melakukan penelitian lebih lanjut khususnya pada topik implementasi e-government pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah DKI Jakarta.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan sebagai tambahan informasi dan bahan masukan dalam mengkaji mengenai implementasi e-government.
- b. Hasil penelitian ini sebagai kontribusi pemikiran yang dapat menjadi rekomendasi instansi dalam mengatasi masalah yang berkaitan dengan implementasi e-goverment.



**POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A**